

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS DAN KONEKSI POLITIK PADA *TAX AVOIDANCE*

Ni Kadek Yuliani Utari¹
Ni Luh Supadmi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: yuliotari95@gmail.com telp: +62 81238176107

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Upaya mengurangi hutang pajak secara legal dengan cara memanfaatkan *loophole* dari peraturan perpajakan didefinisikan sebagai *tax avoidance*. Penelitian ini memiliki tujuan menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan koneksi politik pada *tax avoidance*. Seluruh perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2012–2015 merupakan populasi yang diambil. Metode pemilihan sampel didapatkan melalui teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 128 observasian. Analisis linear berganda digunakan untuk menganalisa data penelitian. Berdasarkan hasil analisis, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit merupakan proksi dari *corporate governance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada *tax avoidance*. Profitabilitas diukur menggunakan *return on assets* berpengaruh negatif dan signifikan pada *tax avoidance*, serta koneksi politik yang diukur dengan variabel *dummy* berpengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance*.

Kata kunci : *Corporate governance*, profitabilitas, koneksi politik, *tax avoidance*.

ABSTRACT

Efforts to reduce tax liabilities legally by utilizing the loophole on the tax regulations defined as tax avoidance. The purpose of this study was to test and provide empirical evidence of the influence of corporate governance, profitability and political connections on tax avoidance. The entire industrial companies and real estate properties listed on the Stock Exchange for the period 2012-2015 the populations were taken. Method of selecting samples obtained through purposive sampling techniques in order to obtain 128 observasian. Multiple linear analysis was used to analyze the research data. Based on the analysis, the proportion of independent directors and the existence of an audit committee as a proxy of corporate governance and no significant negative effect on tax avoidance. Profitability was measured using return on assets and a significant negative effect on tax avoidance, as well as political connections, as measured by a dummy variable positive and significant impact on tax avoidance.

Keywords : *Corporate governance, profitability, political connection, tax avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber pendapatan utama kas negara, digunakan dalam pembangunan nasional untuk mendukung program pemerintah dalam

mensejahterakan masyarakat. Lembaga pemungut pajak meninjau, bahwa pajak dapat dikategorikan menjadi dua jenis, diantaranya adalah pajak negara dan pajak daerah. Salah satu sumber pajak negara adalah pajak penghasilan, dikenakan dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan data yang dipublikasikan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah wajib pajak yang terdaftar sampai tahun 2015 sebanyak 30.044.103. Hal ini cukup memprihatinkan karena hingga data tahun 2013 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) baru sekitar 29,4 persen dari total penduduk Indonesia mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP dan belum semua perusahaan yang telah beroperasi terdaftar sebagai WP Badan (www.pajak.go.id). Besarnya peranan pajak pada penerimaan negara masih belum memenuhi target dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik awal tahun 2016 disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2015
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	% Penerimaan Per Tahun
2012	1.016.000,00	980.518,10	96,51%
2013	1.148.000,00	1.077306,70	93,84%
2014	1.246.000,00	1.146865,80	92,04%
2015	1.761.600,00	1.489.255,50	84,54%

Sumber: www.bps.go.id

Tabel 1 menunjukkan bahwa target penerimaan pajak dan realisasinya mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2015, sedangkan persentase

penerimaan pertahunnya justru mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena besarnya persentase kenaikan target tidak diimbangi oleh realisasi penerimaan, disamping adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah yang menganggap pajak merupakan pengalihan sumber daya dari perusahaan kepada pemerintah. Perbedaan kepentingan tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kenyataan bahwa Indonesia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tergolong rendah tercermin dari *tax ratio* sebesar 11,77 persen. Prasetyo (www.bppk.kemenkeu.go.id, 2014) mengungkapkan, penyebab rendahnya *tax ratio* disebabkan rendahnya penerimaan pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan banyak wajib pajak yang belum mematuhi peraturan perpajakan, menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak dari jumlah yang ditargetkan. Salah satu praktik yang mencerminkan ketidakpatuhan tersebut adalah *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan upaya memanfaatkan *loophole* dari peraturan perpajakan yang tidak sesuai dari maksud dan tujuan dari peraturan perpajakan itu sendiri yang bersifat legal guna menghindari pajak (Dewi dan Jati, 2014). Praktik ini dilakukan wajib pajak agar jumlah yang dibayarkan kepada otoritas pajak berkurang.

Niat menentukan perilaku yang akan dilakukan seseorang. Keyakinan akan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan pajak mempengaruhi manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* sesuai teori tindakan beralasan (TRA). Teori ini menyatakan, manusia berperilaku secara sadar dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia. Praktik *tax avoidance*

dilakukan manajemen perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang diwajibkan secara legal (Diantari dan Ulupui, 2016). Persoalan *tax avoidance* terlihat rumit sekaligus unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, akan tetapi *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Suatu perusahaan, selain diharapkan untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance* juga dituntut untuk menerapkan *corporate governance*. Diterapkannya *corporate governance* dapat meminimalisir adanya praktik *tax avoidance*. *Corporate governance* merupakan faktor yang menentukan penilaian yang dimaksud dalam penghematan pajak, artinya perusahaan yang menerapkan mekanisme tersebut secara terstruktur dengan baik akan diikuti tingkat kepatuhan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Sartori, 2010). Proporsi komisaris independen dan komite audit digunakan sebagai proksi dari *corporate governance*.

Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan untuk membuat laporan keuangan lebih objektif dan mendukung pengelolaan perusahaan yang baik (Maria dan Kurniasih, 2013). Kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan pihak manajemen perusahaan yang dilaporkan, dipercaya akan berkurang dengan adanya komisaris independen. Komisaris independen memiliki tanggung jawab kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen harus memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan agar dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto dan Puspita, 2014). Dewan Komisaris dibantu komite audit melakukan pengawasan pada pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan untuk meminimalisir kecenderungan penekanan pada biaya-

biaya yang akan dikeluarkan oleh manajer terutama biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan mencegah perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

Maya Sari (2014), Khoirunissa (2015) dan Rachmitasari (2015), menyatakan pengaruh proporsi komisaris independen signifikan pada *tax avoidance*, sementara tidak ada pengaruh komite audit pada *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dari penelitian Ayu Annisa (2011), dan Faisal Reza (2012), menyatakan tidak ada pengaruh proporsi komisaris independen pada *tax avoidance*, sementara komite audit berpengaruh pada *tax avoidance*. Diantari (2016), menyatakan proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit berpengaruh pada *tax avoidance*.

Faktor lainnya diprediksi mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah salah satu ukuran kinerja dalam menggambarkan kemampuan menghasilkan laba selama periode tertentu dalam suatu perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Anderson dan Reeb (2003) menyatakan, suatu perusahaan dengan profitabilitas yang baik, terlihat mempunyai nilai *effective tax rates* yang lebih tinggi. Profitabilitas diproksikan menggunakan proksi *Return On Assets* (ROA). ROA mampu mencerminkan kemampuan beroperasi perusahaan dalam mendapatkan laba. Perusahaan yang mampu mengelola pendapatan dan pembayaran pajaknya dianggap memperoleh laba sehingga diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance*. Kurniasih dan Sari (2013) didukung oleh penelitian Damayanti dan Susanto (2015) menyatakan ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Bertentangan dengan

Rachmitasari (2015) yang menyatakan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *corporate governance* dan profitabilitas, faktor lain diprediksi mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah koneksi politik. Dunia bisnis berhubungan erat dengan politik. Berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. Perusahaan yang memiliki cara-cara tertentu untuk terhubung secara politik dan menjalin hubungan dengan politisi atau pemerintah dapat dikatakan perusahaan yang terkoneksi politik (Purwoto, 2011). Koneksi politik diharapkan mampu memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak.

Koneksi politik diukur dengan menggunakan kriteria koneksi politik untuk menilai ada tidaknya koneksi politik dalam perusahaan. Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh koneksi politik pada praktik *tax avoidance*. Namun, hasil yang diperoleh masih berbeda-beda. Penelitian oleh Nugroho (2011) didukung oleh Alfia (2015) dan Dharma & Agus (2016), menyatakan koneksi politik tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Sementara, Mulyani *dkk.* (2013) menemukan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena tersebut dilakukan penelitian kembali untuk menguji pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan koneksi politik pada *tax avoidance*. Pokok permasalahan dirumuskan, 1) Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh pada *tax avoidance*?; 2) Apakah keberadaan komite audit berpengaruh pada *tax avoidance*?; 3) Apakah profitabilitas

berpengaruh pada *tax avoidance*?; 4) Apakah koneksi politik berpengaruh pada *tax avoidance*?. Tujuan penelitian untuk membuktikan apakah komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan koneksi politik berpengaruh pada *tax avoidance*.

Kegunaan penelitian secara teoritis, dapat memberikan bukti secara empiris mengenai teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori tindakan beralasan (TRA), menyatakan penentu tindakan diambil oleh perusahaan berhubungan dengan pengaruh sosial. Secara praktis dapat memberikan masukan kepada regulator untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang lebih baik dan teliti dalam memeriksa pajak perusahaan untuk tercapainya penerimaan negara yang lebih optimal.

Icek Ajzen dan Martin Fishbein (1980) mengembangkan teori tindakan beralasan menjelaskan suatu individu melakukan perilaku berdasarkan niat untuk melakukannya (*behavioral intention*). Perilaku yang dilakukan dengan keinginan didefinisikan sebagai niat. *Theory of reasoned action* mengasumsikan bahwa manusia berperilaku secara sadar, mempertimbangkan segala informasi, serta mempertimbangkan akibat secara implisit dan spesifik dari tindakan yang dilakukan.

Tax avoidance merupakan transaksi yang bersifat semu (tidak mempunyai substansi bisnis) dengan cara memanfaatkan *loophole* dari peraturan perpajakan (Eiecke (2009) dalam Darussalam *et al.*(2010:199)). Usaha mengurangi, atau bahkan menghilangkan hutang pajak secara legal adalah upaya *tax avoidance* (Xynas, 2011). Patermak dan Rico dalam Kholbadalov (2012:1) menyatakan,

legal utilization of the tax regime to one's own advantage, to reduce the amount of the tax that is payable by means that are within the law. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan model pengukuran, yang mengidentifikasi adanya praktik *tax avoidance* (Chen *et al.* 2010). CETR mampu menggambarkan perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, karena CETR melibatkan *cash flow* dalam pembayaran pajak (Dyrenge, *et al.* 2010).

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa dan diperuntukan oleh orang pribadi atau badan yang terutang untuk membiayai keperluan Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelimpahan sumber dari swasta ke pemerintah bersifat wajib didefinisikan sebagai pajak. Keberadaan komisaris independen yang kuat akan sangat menunjang terlaksananya tugas sebagai pengawas perseroan. Egon Zehnder (2000) mengungkapkan komisaris independen bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada pengelola perusahaan untuk menjamin ketahanan dan kesuksesan perusahaan, serta berkewajiban untuk terlaksananya akuntabilitas dalam perusahaan. Minnick dan Noga (2010) mengungkapkan proporsi komisaris independen yang besar, dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan kerja dan kekayaan pemegang saham.

Kurniasih & Sari (2014) di dukung oleh penelitian dari Rachmithasari (2015) menyatakan pengaruh negatif komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Jika proporsi komisaris independen meningkat dalam suatu perusahaan, maka praktik *tax avoidance* akan menurun. Adanya komisaris independen akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan. Hipotesis yang dibangun adalah:

H₁ : Komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Kurniasih & Sari (2014) membuktikan pengaruh negatif yang dimiliki komite audit terhadap *tax avoidance*, ini di dukung oleh penelitian dari Dewi dan Jati (2014) serta Rachmithasari (2015), yang menyatakan pengaruh negatif komite audit terhadap *tax avoidance*. Keberadaan komite audit yang semakin tinggi, menyebabkan *corporate governance* mengalami peningkatan kualitas perusahaan dan memperkecil terjadinya praktik *tax avoidance*. Adanya komite audit akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan. Hipotesis yang dibangun adalah:

H₂ : Komite Audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Penelitian Kesit (2014) menyebutkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Cahya Maharani & Suardana (2014), Kurniasih & Sari (2014), Damayanti & Susanto (2015) menyatakan pengaruh negatif dan signifikan dari ROA terhadap *tax avoidance*. Besarnya nilai profitabilitas yang didapatkan perusahaan akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan untuk memaksimalkan jumlah laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi nilai ROA akan menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin kecil nilai ROA akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hipotesis yang dibangun adalah:

H₃ : Profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Perusahaan atau konglomerat memiliki suatu hubungan dengan pemerintah diasumsikan memiliki koneksi politik (Gomez dan Jomo dalam

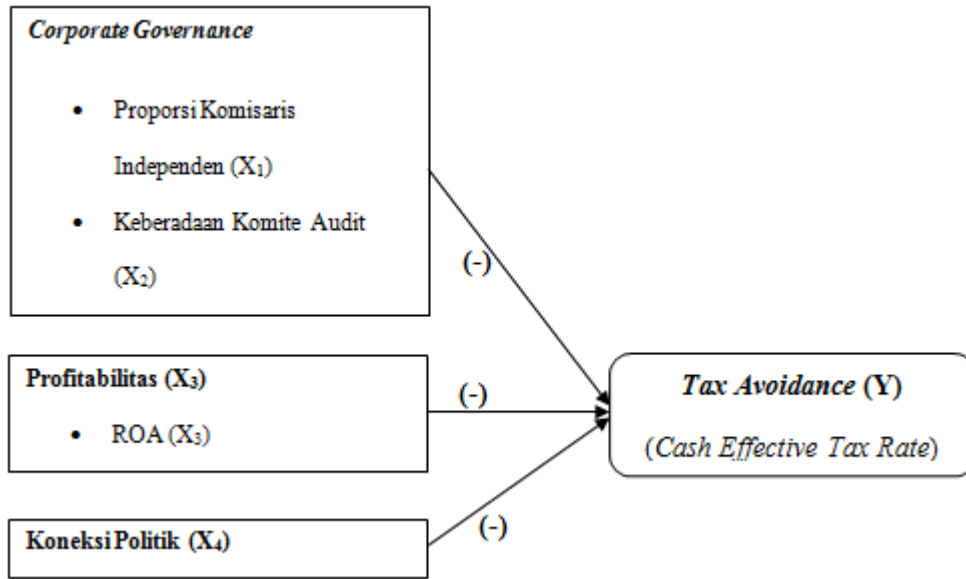
Wahab, 2011a). Fan *et al.* (2007) mengungkapkan, perusahaan dengan CEO terkoneksi politik akan memiliki 37 persen kemampuan kerja lebih rendah daripada perusahaan tidak terkoneksi politik. Koneksi politik diyakini merupakan sumber berharga untuk banyak perusahaan (Leuz dan Gee, 2006).

Adhikari *et al.* (2006); Richter *et al.* (2009); Brown *et al.* (2014); Li (2015); Kim & Zhang, (2015), menyatakan pengaruh negatif dan signifikan koneksi politik terhadap *tax avoidance* yang sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah. Adanya koneksi politik dalam suatu perusahaan, akan menyebabkan kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance* menjadi rendah. Hipotesis yang dibangun adalah:

H₄ : Koneksi politik berpengaruh negatif pada *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Desain penelitian kausatif digunakan sebagai pengukuran hubungan antar variabel riset, atau menganalisa pengaruh variabel terhadap variabel lainnya. Desain penelitian disajikan pada Gambar 1. Penelitian dilakukan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. CETR, KI, KA, ROA dan koneksi politik dipilih menjadi objek penelitian. Data kuantitatif sebagai data penelitian didapatkan dari sumber data sekunder. Variabel yang dipilih meliputi, *corporate governance*, profitabilitas dan koneksi politik sebagai variabel independen, dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.



Gambar 1. Model Desain Penelitian

Sumber: Data diolah, 2016

Tax avoidance merupakan usaha penurunan pajak yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan dengan manfaat menggunakan kelemahan berupa hal-hal yang dikecualikan dan potongan diperbolehkan maupun melakukan penundaan pajak. Indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan sebagai pengukuran *tax avoidance*, yaitu:

$$CETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{earning before tax}} \dots\dots\dots(1)$$

Corporate governance yang dilakukan perusahaan dalam hal tata cara pengelolaan perusahaan yang baik guna memberi nilai tambah bagi perusahaan diprosikan dengan proporsi komisaris independen yaitu:

KI =

$$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \dots\dots\dots(2)$$

Corporate governance yang dilakukan perusahaan dalam hal tata cara pengelolaan perusahaan yang baik guna member nilai tambah bagi perusahaan diproksikan dengan keberadaan komite audit yaitu:

$$KA = \frac{\text{jumlah komite audit}}{\text{jumlah dewan komisaris independen}} \dots\dots\dots(3)$$

ROA merupakan selisih laba bersih dibagi total aset selama satu periode akuntansi ang dapat menggambarkan usaha perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Kurniasih & Sari, 2013), rumus yang digunakan yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Variabel *dummy* digunakan untuk pengukuran koneksi politik, diberi nilai 1 untuk perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria koneksi politik dan bernilai 0 jika tidak. Kriteria koneksi politik penelitian, yaitu: 1) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap politisi; 2) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap pejabat pemerintahan; 3) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap pejabat militer; 4) Pemilik perusahaan atau pemegang saham merupakan politisi/ pejabat pemerintah/ pejabat militer/ mantan pejabat pemerintah mantan pejabat militer.

Populasi yang digunakan mencakup seluruh perusahaan terdaftar dalam industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012-2015. Metode *non-probability sampling* digunakan dalam proses penentuan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Data penelitian dikumpulkan dengan metode observasi non partisipan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

- Y = Variabel *tax avoidance*
- α = Konstanta
- X₁ = Proporsi dewan komisaris independen
- X₂ = Keberadaan komite audit
- X₃ = ROA
- X₄ = Koneksi Politik
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresi parsial
- ε = Standar *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi linear berganda agar model regresi dapat dianalisis dengan baik, sehingga bebas dari asumsi-asumsi yang bersifat BLUE. Jumlah data dalam penelitian sebanyak 32 perusahaan dikalikan dengan 4 tahun menghasilkan 128 observasi. Berdasarkan 128 data perusahaan yang diteliti, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Uji normalitas digunakan dalam uji persamaan regresi data variabel bebas dengan variabel terikat terdistribusi normal, menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan koefisien *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (5%), memiliki distribusi normal.

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	128
Kolmogorov-Smirnov Z	1.294
Asymp, Sig. (2-tailed)	.070

Sumber: Hasil SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 2, nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang didapat 0,70 lebih besar dari 0,05, yang artinya penelitian ini memiliki data berdistribusi normal.

Uji autokorelasi bertujuan melakukan uji pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam suatu model memiliki interelasi antara *error* per-periode t dengan *error* per-periode $t-1$. Uji *Durbin-Watson* (*DW-test*) digunakan untuk menguji autokorelasi.

Tabel 3.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.533(a)	.284	.261	.13940	1.747

Sumber: Hasil SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 3 didapat nilai *Durbin Watson* sebesar 1,747 berada diantara -2 sampai dengan 2. Dapat diasumsikan tidak terjadi autokorelasi.

Uji multikolinieritas digunakan mengukur tingkat kekuatan hubungan antar variabel bebas. Menemukan ada tidaknya interelasi sesama variabel bebas dinilai melalui nilai *tolerance*, dan VIF. Apabila nilai $\alpha/\textit{tolerance} = 10\%$ atau 0,10 atau $\textit{VIF} < 10\%$, antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

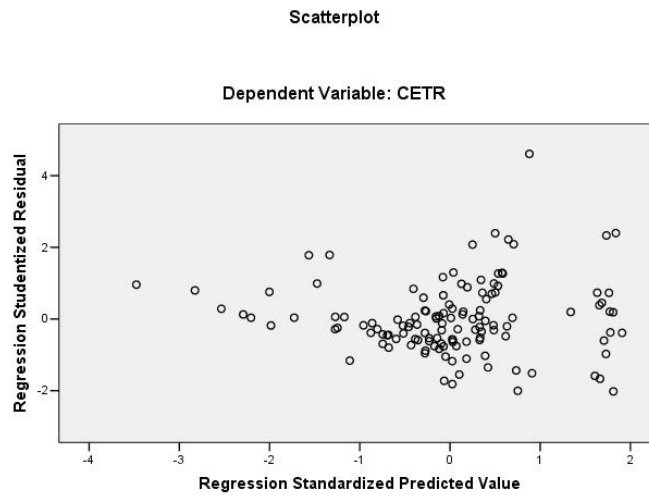
Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.417	.096		4.347	.000		
KI	-.150	.169	-.081	-.887	.377	.699	1.430
KA	-.013	.019	-.063	-.703	.483	.730	1.371
ROA	-.130	.249	-.415	-5.263	.000	.937	1.068
KP	.120	.040	.246	3.012	.003	.875	1.142

Sumber: Hasil SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai *tolerance* pada KI, KA, ROA dan KP dengan nilai 0,699, 0,730, 0,937, dan 0,875. Sedangkan nilai VIF pada KI, KA, ROA dan KP dengan nilai 1,430, 1,371, 1,068, dan 1,142. Hal ini membuktikan bahwa pada penelitian tidak terjadi multikoleniaritas.

Uji heteroskedastisitas berguna menguji apakah pengamatan yang diuji terjadi ketidaksamaan variansi dengan pengamatan lain.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil SPSS, 2016

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat gambar grafik *scatterplot*. Hasil gambar tidak membentuk pola teratur dan titik-titik yang tersebar di bawah dan di atas titik origin (angka 0) menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Statistik deskriptif memiliki tujuan memberi penjelasan individualitas variabel diteliti dapat dilihat melalui jumlah amatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi per variabel.

Tabel 5.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	128	.00	.97	.2561	.16213
KI	128	.25	.75	.3887	.08764
KA	128	.05	.40	.1954	.77902
ROA	128	.00	.29	.0703	.05138
KP	128	.00	1.00	.1250	.33202
Valid N (listwise)	128				

Sumber: Hasil SPSS, 2016

Cash Effective Tax Ratio (CETR) merupakan proksi dari variabel *tax avoidance* yang menunjukkan seberapa besar perusahaan mengeluarkan kas untuk pembayaran pajak penghasilan dari laporan laba rugi terhadap laba yang diperoleh sebelum pajak. Nilai CETR yang semakin besar mengindikasikan tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum CETR 0,00 dengan nilai maksimum 0,97 dan nilai rata-rata CETR 0,2561 mengindikasikan rata-rata pengeluaran kas untuk pembayaran pajak penghasilan perusahaan yang menjadi sampel penelitian lebih tinggi 25,61 persen dari laba sebelum pajak yang didapat perusahaan.

Komisaris Independen (KI) merupakan proksi dari variabel *corporate governance* yang menunjukkan seberapa besar proposi komisaris independen dalam pengambilan keputusan yang diambil perusahaan terhadap jumlah dewan komisaris. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum KI 0,25 dengan nilai maksimum 0,75 dan nilai rata-rata 0,3887 mengindikasikan rata-rata proporsi dewan komisaris dalam pengambilan keputusan sebesar 38,87 persen dari jumlah seluruh dewan komisaris yang ada dalam perusahaan.

Komite Audit (KA) merupakan proksi dari variabel *corporate governance* yang menunjukkan seberapa besar keberadaan komite audit mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan terhadap jumlah dewan komisaris independen. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum KA 0,05 dengan nilai maksimum 0,40 dan rata-rata 0,19540 mengindikasikan rata-rata keberadaan komite audit dalam mempengaruhi pengambilan keputusan sebesar 19,54 persen dari jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan.

Return On Asset (ROA) merupakan proksi dari profitabilitas yang menunjukkan rasio antara keuntungan (rugi) bersih perusahaan setelah pengenaan pajak terhadap total aset. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum ROA 0,00 dengan nilai maksimum 0,29 serta nilai rata-rata 0,0703 mengindikasikan rata-rata daya perusahaan sampel untuk mendapatkan laba 7,03 persen dari total aset perusahaan.

Koneksi Politik (KP) yang diukur menggunakan proksi pengukuran *dummy*. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum rata-rata KP 0,00 dengan nilai maksimum 0,1250 dan nilai rata-rata KP 0,33202 mengindikasikan rata-rata perusahaan yang memiliki koneksi politik sebesar 33,2 persen dari total keseluruhan sampel.

Uji kelayakan model (F) bertujuan sebagai alat prediksi yang menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan fenomena dari variabel dependen. Model dikatakan layak apabila nilai signifikansi F atau *Probabilities value* $< \alpha = 0,05$.

Tabel 6.
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.984	4	.237	12.198	.000
Residual	2.390	123	.019		
Total	3.338	127			

Sumber: Hasil SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 6 ditunjukkan nilai signifikansi adalah 0,000. Nilai 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) memiliki arti, model regresi disajikan layak memprediksi pengaruh variabel independen pada variabel dependen.

Uji Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen pada perubahan variabel dependen. *R-Square* berada antara nol sampai dengan satu.

Tabel 7.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533(a)	.284	.261	.13940

Sumber: Hasil SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 7, nilai *adjusted R square* sebesar 0,261 artinya 26,1 persen variansi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, profitabilitas, dan koneksi politik. Sedangkan sisanya 73,9 persen *tax avoidance* dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

Uji hipotesis (uji t) dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian, seberapa besar pengaruh variabel independen pada variabel dependen, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 8.
Hasil Uji Hipotesis (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.417	.096		4.347	.000
	KI	-.150	.169	-.081	-.887	.377
	KA	-.013	.019	-.063	-.703	.483
	ROA	-.130	.249	-.415	-5.263	.000
	KP	.120	.040	.246	3.012	.003

Sumber: Hasil SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 8, dapat dijelaskan, hipotesis pertama menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh pada *tax avoidance* (H_1). Hasil untuk variabel proporsi komisaris independen 0,377 lebih besar dari signifikansi 0,05 dan nilai koefisien regresi -0,150. Hasil pengujian tersebut menunjukkan

jika proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance* (H₁ ditolak).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh pada *tax avoidance* (H₂). Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel keberadaan komite audit 0,483 lebih besar dari signifikansi 0,05 dan nilai koefisien regresi - 0,013. Hasil pengujian tersebut menyatakan jika keberadaan komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance* (H₂ ditolak).

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh pada *tax avoidance* (H₃). Hasil yang diperoleh untuk variabel profitabilitas 0,00 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dan nilai koefisien regresi -0,130. Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance* (H₃ diterima).

Hipotesis keempat menunjukkan jika koneksi politik berpengaruh pada *tax avoidance* (H₄). Hasil dari uji t untuk variabel keberadaan komite audit 0,03 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dan nilai koefisien regresi 0,120. Hasil pengujian tersebut menunjukkan jika koneksi politik berpengaruh positif pada *tax avoidance* (H₄ ditolak). Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda, bertujuan mengetahui hubungan antara proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, *return on assets*, dan koneksi politik pada *tax avoidance* perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 9.
Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.417	.096		4.347	.000
	KI	-.150	.169	-.081	-.887	.377
	KA	-.013	.019	-.063	-.703	.483
	ROA	-.130	.249	-.415	-5.263	.000
	KP	.120	.040	.246	3.012	.003

Sumber: Hasil SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 9, persamaan regresi penelitian yang digunakan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0,417 - 0,150X_1 - 0,013X_2 - 0,130X_3 + 0,120X_4 + \epsilon_1$$

Nilai konstanta 0,417 artinya, proporsi komisaris independen (X_1), keberadaan komite audit (X_2), *return on assets* (X_3), dan koneksi politik (X_4) tidak ada atau bernilai nol, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan adalah sebesar 0,417 satuan.

Nilai koefisien $\beta_1 = 0,150$ artinya, jika proporsi dewan komisaris independen (X_1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan terjadi penurunan tingkat *tax avoidance* (Y) yang dilakukan perusahaan sebesar -0,150 dan diasumsikan variabel independen lainnya tetap.

Nilai koefisien $\beta_2 = 0,013$ artinya, jika keberadaan komite audit (X_2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan terjadi penurunan tingkat *tax avoidance* (Y) yang dilakukan perusahaan sebesar -0,013 dan diasumsikan variabel independen lainnya tetap. Nilai koefisien $\beta_3 = 0,130$ artinya, jika *return on assets* (X_3) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan terjadi penurunan tingkat *tax avoidance* (Y) yang dilakukan perusahaan sebesar -0,130 dan diasumsikan variabel independen lainnya tetap. Nilai koefisien $\beta_4 = 0,120$ artinya, jika koneksi politik (X_4) mengalami peningkatan sebesar satu satuan

maka akan terjadi kenaikan tingkat *tax avoidance* (Y) yang dilakukan perusahaan sebesar 0,120 dan diasumsikan variabel independen lainnya tetap.

Berdasarkan Tabel 9, variabel *corporate governance* diproksikan dengan proporsi komisaris independen (KI) memiliki koefisien regresi (-0,150) dan t hitung (-0,887) dengan nilai signifikansi 0,377 lebih besar dari signifikansi 0,05. Hal tersebut menyatakan jika proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, sehingga H_1 ditolak. Penelitian oleh Ayu Annisa (2011) dan Faisal Reza (2012) menyatakan hasil yang sesuai dengan penelitian ini, yang menyebutkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, menunjukkan bahwa besarnya proporsi komisaris independen dalam perusahaan tidak efektif untuk pencegahan praktik *tax avoidance*. Komisaris independen hanya bisa mengawasi kinerja manajemen, wewenang komisaris independen tidak bisa langsung mempengaruhi perilaku dari manajemen dalam pengambilan keputusan. *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan, perilaku dari manajemen didasarkan oleh faktor pribadi mengenai kepercayaan untuk melakukan perilaku tertentu yang dikehendaki dan memiliki hubungan terhadap pengaruh sosial. Peran komisaris independen dalam mekanisme *corporate governance* diindikasikan tidak melaksanakan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap perilaku perusahaan terutama dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan.

Berdasarkan Tabel 9, variabel *corporate governance* yang diproksikan dengan keberadaan komite audit (KA) memiliki koefisien regresi (-0,013) dan t hitung (-0,703) dengan nilai signifikansi 0,483 lebih besar dari signifikansi 0,05.

Hal ini mengindikasikan keberadaan komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, sehingga H₂ ditolak. Penelitian oleh Maya Sari (2014), Khoirunnisa (2015), dan Rachmitasari (2015) menyebutkan hasil yang sesuai dengan hasil penelitian yang menyebutkan, keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Berdasarkan pengujian, menunjukkan keberadaan komite audit yang bertanggung jawab mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi laporan keuangan yang dilakukan audit eksternal tidak berjalan dengan baik. Keberadaan komite audit hanya memenuhi ketentuan. Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris yang berfungsi dalam memberi pandangan terhadap masalah kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern mungkin hanya dijadikan pertimbangan dan tidak bisa mempengaruhi perilaku perusahaan. Pengambilan keputusan tetap berada di tangan manajemen itu sendiri termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan. Tindakan manajemen tersebut dapat dijelaskan dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA). TRA menjelaskan bahwa perilaku perusahaan terhadap pengambilan keputusan perpajakannya, didasarkan atas niat dan keinginan manajemen untuk melakukan tindakan yang dianggap menguntungkan. Sehingga, keputusan yang diambil pihak manajemen tidak dipengaruhi oleh pandangan komite audit terhadap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan.

Berdasarkan Tabel 9, variabel profitabilitas diproksikan *Return On Assets* (ROA) memiliki koefisien regresi (-1,309) dan t hitung (-5,263) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari signifikansi 0,05. Menunjukkan profitabilitas

berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sehingga H₃ diterima. Hasil ini sesuai penelitian Kurniasih dan Sari (2014), membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan pada *tax avoidance*.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa profitabilitas yang digambarkan melalui *Return On Assets* (ROA) yang dinilai dari efektivitas penggunaan aktiva dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan laba berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini diartikan, besarnya keuntungan perusahaan sangat berpengaruh pada tindakan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Koefisien variabel ROA menunjukkan arah pengaruh yang negatif terhadap *Cash ETR*. Tingginya nilai ROA menyebabkan performa perusahaan semakin bagus. Besarnya nilai profitabilitas akan mempengaruhi tindakan yang diambil oleh perusahaan. Manajemen mempertimbangkan tersedianya segala informasi dari nilai profitabilitas, dan mempertimbangkan implikasi tindakan yang diambil secara implisit dan eksplisit termasuk tindakan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Kesalahan yang timbul akibat pengambilan tindakan yang kurang tepat akan mempengaruhi citra perusahaan. *Theory of reasoned action* menjelaskan bagaimana perilaku perusahaan dipengaruhi oleh pertimbangan dasar terhadap perilaku yang dikehendaki. Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang bagus diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena pertimbangan citra perusahaan akan menjadi buruk apabila perusahaan melakukan praktik tersebut.

Berdasarkan Tabel 9, variabel koneksi politik yang diproksikan dengan variabel *dummy* memiliki koefisien regresi 0,120 dan t hitung 3,012 dan signifikansi 0,003 lebih kecil dari signifikansi 0,05. Menunjukkan koneksi politik berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sehingga H₄ ditolak.

Aktivitas dunia usaha didalam suatu negara harus mendapat izin dari pemerintah, sehingga terjalin koneksi yang saling mengikat baik secara langsung maupun tidak antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan membutuhkan pemerintah untuk melegitimasi kegiatannya di dalam pasar, dan pemerintah membutuhkan perusahaan-perusahaan untuk menaikkan pendapatan ekonomi Negara. Pemerintah sendiri mengembangkan usaha untuk menaikkan ekonomi Negara melalui perusahaan-perusahaan yang di naungi dalam Badan Usaha Milik Negara. Secara tidak langsung, banyak konglomerat ikut terlibat atau pernah terlibat dalam dunia politik. Akibatnya terjadi dualism kepentingan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan rakyat yang diemban oleh pemerintah. Sebagai pelaksana kegiatan pemerintah yang berkewajiban meningkatkan penerimaan negara dan dilain pihak sebagai pemilik perusahaan memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan agar meningkat dan terhadap investasi atas perusahaan harus melakukan pengembalian. Salah satu caranya adalah dengan melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian menunjukkan koneksi politik berpengaruh positif pada *tax avoidance* menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* terutama dari pihak BUMN. Meskipun *tax avoidance* bersifat legal menurut hukum, tetapi akan menyebabkan kerugian negara yang berimbas pada

penerimaan negara dari sektor pajak. Perusahaan BUMN diduga tidak mungkin melakukan *tax avoidance* dan dianggap wajib pajak berisiko rendah didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.03/2010 justru merupakan pihak yang mempraktikkan *tax avoidance*. Perilaku yang dilakukan oleh individu karena mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan perilaku tertentu dan sifat dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan untuk memperoleh manfaat dari kelemahan peraturan berlaku untuk siapa saja, tidak terkecuali BUMN sekalipun dapat dijelaskan oleh *theory of reasoned action*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen terbukti tidak berpengaruh pada *tax avoidance*; *Corporate governance* diproksikan dengan keberadaan komite audit terbukti tidak berpengaruh pada *tax avoidance*; Profitabilitas diproksikan dengan *return on assets* terbukti berpengaruh negatif pada *tax avoidance*; Koneksi politik diproksikan dengan variabel *dummy* terbukti berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka saran terkait penelitian yang telah dilakukan yaitu, bagi pemungut pajak (fiskus), monitoring dan pengawasan ditingkatkan agar dapat mengurangi adanya praktik *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil dalam penelitian ini yang menunjukkan perusahaan memiliki koneksi politik terbukti dapat melakukan *tax avoidance*; bagi perusahaan yang sudah *go public* dapat memaksimalkan sumber dayanya agar memperoleh laba dan dapat mengelola beban pajak perusahaan dengan risiko yang rendah dan; bagi

peneliti berikutnya, yang meneliti topik yang sama, perlu dikaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance*.

REFERENSI

- Adhikari Ajay, Chek Derashid and Hao Zhang. 2006. Public Policy, Political Connections and Effectives Tax rates: Longitudinal Evidences from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25: 574-995.
- Ajzen, Icek dan Fishbein. 1980. *Theory of Reasoned Action*. Edisi Kesatu.
- Alfia, Ratika Hanna. 2015. Pengaruh Corporate Governance, Karakter Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Upaya Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilimiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya.
- Anderson, R. dan Reeb, D. 2003. Founding family ownerships and firm performance: evidences from the S&P 500. *Journal of Finance* 58, 1301-1328.
- Ayu Annisa, Nuralifmida. 2011. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Cahya Maharani, I Gusti Ayu & Suardana, Ketut Alit. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 (2014):525-539.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*. 95, 41-61.
- Damayanti, Fitri & Susanto, Tridahus. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Manajemen*. Vol. 5, No. 2, Oktober 2015.
- Darussalam, Hutagaol, J. & Septriadi, D. 2010. *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta : PT Dimensi Internasional Tax 2010.

- Desai, M. A. dan Dharmapala, D. 2007. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Journal of Financial Economics*.
- Dewi, Ni Nym Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6, No.2, Hal. 249-260.
- Diantari, Putu Rista & Ulupui, IGK Agung. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.1. Juli (2016): 702-732.
- Egon Zehnder International. 2000. *Corporate Governance and The Role of The Board of Directors*.
- Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1): 369- 386.
- Faisal Reza. 2012. *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak*. Fakultas Ekonomi, Program S1 Ekstensi Akuntansi Depok.
- Fan, J.P.H., Wong, T.J., Zhang, T., 2007. Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post-IPO Performances of China's Newly Partially Privatized Firms. *Journal of Financial Economics* 84:330-357.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2014. Pengaruh Profitabilitas Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Kholbadlov, Utkir. 2012. "The Relationships of Corporate Tax Avoidance, Cost of Debt and Institutional Ownership: Evidence from Malaysia". *Atlantic Review of Economics*, (2): 1-35.
- Kim, C.F., & Zhang, L. 2015. Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, Forthcoming.
- Kurniasih, Tommy., dan Sari Maria M. Ratna. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *E-journal* Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.

- Leuz, C., and F. Oberholzer-Gee. 2006. Political Relationships, Global Financing, and Corporate Transparency: Evidences from Indonesia. *Journal of Financial Economics* 81 (2):411-439.
- Li, C., Wang, T., Wu, L. dan Xiao, J. Z. 2013. Political Connections and Tax-Induced Earnings Management: Evidence from China. *The European Journal of Finance* 20: 1-19.
- Maharani, I. G. A., & K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 9 (2): 525-539.
- Maya Sari, Gusti. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Journal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*.
- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance* 16 (5): 703-718.
- Mulyani, Sri., Darminto & Endang N.P, M.G. Wi. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Pranoto, Bayu Agung. & Widagdo, Ari Kuncoro. 2015. Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness. *Seminar Nasional 3rd Call for Syariah Paper*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.
- Purwoto, Lukas. 2011. "Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham". *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen*. Universitas Gadjah Mada.
- Rachmithasari, Annisa Fadilla. 2015. Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Raharjo, Arko Soni dan Daljono. 2014. Pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan dan Indeks Corporate

- Governance terhadap Asimetri Informasi. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3, No.3, Hal. 1-13.
- Richter, B., Sampantharak, K., dan Timons, J. 2009. Lobbying and Taxes. *American Journal of Political Science* 53: 893-909.
- Rista Diantari, Putu. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-jurnal Akuntansi, Universitas Udayana*. Vol.16.1.Juli (2016):702-732.
- Rodriguez, E. F. dan Arias A. M. 2013. "Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?". *The Chinnese Economy*, Vol. 45, No. 6.
- Surya Darma, I. Made. & Agus Ardiana, Putu. 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.15.1 April(2016): 584-613.
- Vabriani, Winda. 2016. Pengaruh Kompensasi Manajemen, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wahab, Effiezal A. A., Mazlina Mat Z., dan Kieran James. 2011a. Political Connections, Corporate Governance and Audited Fee in Malaysia. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 26 No. 5, ppt393-418.
- Xynas, Lidia, 2011. Tax Planning Avoidance and Evasion in Australian 1970-2010: The Regulatory Response and Taxpayer Compliances. *Revenue Law Journal*. 20-1.